



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. R.M. Nur Atmadibrata No. 4 Telanaipura Telp/Fax. (0741) 64341

**NOTULEN**

- Sidang/Rapat : Rapat Internal Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah  
Hari/Tanggal : Kamis, 26 September 2019  
Dasar Panggilan : Undangan Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jambi selaku Ketua Tim  
No. S-005/714/Bankesbangpol-2.1/IX/2019  
Tanggal 23 September 2019, hal Undangan Rapat
- Waktu Sidang/Rapat : 09.30 WIB sampai Selesai  
Agenda Rapat : 1. Pembukaan Rapat  
2. Paparan Anggota Tim  
3. Penutup
- Pimpinan Sidang/Rapat  
Ketua : Beni Suriaman, S.STP, MM. (Kabid Fasilitasi Organisasi Politik dan  
Lembaga Perwakilan Bakesbangpol Provinsi Jambi).  
Sekretaris : Zulkarnain, S.ST, MM.
- Peserta Sidang/Rapat : Tim Pemantau Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di  
Daerah Provinsi Jambi, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi  
Nomor 301/Kep.Gub/Bankesbangpol2.1/2019 tanggal 21 Maret 2019  
tentang Pembentukan Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi  
Perkembangan Politik Di Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran  
2019.
1. Kata Pembukaan : H. Mukti, SE, ME. (Sekretaris Kesbangpol Prov. Jambi).
  - Sesuai dengan Permendagri No. 61, dijelaskan tentang Peran dan fungsi Tim. Hal inilah yang diturunkan kepada Keputusan Gubernur Jambi Nomor 301/Kep.Gub/Bankesbangpol2.1/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, hal ini mohon dipahami oleh seluruh anggota tim agar dalam menjalankan tugas pemantauan perkembangan politik di daerah dalam Provinsi Jambi dapat berjalan sebagaimana mestinya.
  - Laporan disampaikan secara berkala, minimal setiap tiga bulan sekali, kecuali, dalam hal tertentu, insidental, maka laporan harus disampaikan segera.
  - Pertemuan informal antara stakeholder terkait, seperti copy morning, dinilai sangat efektif dalam memecahkan kebekuan-kebekuan yang terjadi dalam antara lintas sektoral, sehingga situasi dan kondisi dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas.
  - Banyak hal yang dapat berpotensi terhadap terjadinya gangguan Kamtibmas yang harus dicermati oleh Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah Provinsi Jambi terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak dalam Provinsi Jambi, seperti :
    - Ketidakpuasan masyarakat/mahasiswa atas situasi saat ini
    - Sengketa Lahan
    - Batas Wilayah
    - Sara



**a. AKBP S. Bagus Santoso, S.I.K., M.H.. (Kasubdit Politik Ditintelkam Polda Jambi)**

- Berkaca pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2015 dan pemilihan umum legislative tahun 2019 yang baru saja kita laksanakan dalam Provinsi Jambi, maka kita semua perlu mengambil pelajaran dari setiap kejadian untuk dapat dijadikan pedoman dan pelajaran pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang sebentar lagi akan dilaksanakan di Provinsi Jambi.
- Selain itu Media Sosial juga perlu kita waspadai bersama, mengingat opini masyarakat mudah sekali terbentuk melalui media social ini, padahal seringkali informasi yang beredar melalui media social ini adalah HOAKS.
- Saat ini di Polda Jambi telah terbentuk Tim Counter yang akan mengawasi media social.
- Sampai saat ini situasi dan kondisi dalam Provinsi Jambi relative aman terkendali, meski masih ada riak-riak ketidakpuasan masyarakat dan mahasiswa atas keputusan yang telah diambil eksekutif dan legislative ditingkat pusat yang imbasnya pada semua wilayah termasuk Provinsi Jambi.
- Penyelenggara Pilkada 2020 diharapkan lebih konsisten berpegang teguh pada aturan yang berlaku, sehingga dampak dampaknya seperti kasus Pileg di Kabupaten Sarolangun (Syaihu CS) tidak terjadi lagi.
- Perlu didatangkan tim dari PTUN yang diharapkan dapat memberikan pencerahan terutama kepada stakeholder terkait.

**b. Bambang (BINDA Provinsi Jambi)**

- Instrumen yang telah disempurnakan saat ini dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi anggota tim saat akan melaksanakan tugas pemantauan perkembangan politik daerah pada kabupaten/kota dalam provinsi Jambi.
- Namun demikian, instrumen ini hanya bersifat umum dan bukanlah bersifat mutlak, karena situasi dan kondisi dilapangan.
- Setiap anggota tim dapat membuat laporan sesuai dengan kondisi riil dilapangan, mengingat situasi dan kondisinya ini cenderung akan semakin memanas seiring dengan semakin dekatnya pemilihan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.
- Untuk itu tim pemantau perkembangan politik Daerah yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jambi, diharapkan dapat lebih peka dalam menangkap semua informasi terutama yang berhubungan dengan perkembangan politik daerah. Hal ini penting karena bila wacana pemilihan Kepala daerah yang saat ini digadangkan dilaksanakan secara serentak, maka tugas tim ini akan semakin berat.

**c. Nasuhaidi (KPU Provinsi Jambi)**

- Saat ini KPU telah berupaya untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 semaksimal mungkin antarlain dengan menerbitkan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Pilkada tahun 2020.
- Saat ini calon perseorangan sudah dapat berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jambi, untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi seperti dukungan dari masyarakat melalui KTP Elektronik yang harus mencapai 8,5 % dari jumlah DPT (+ 2.475.665).
- Saat ini pelaksanaan Pilkada 2020 masih menggunakan UU Nomor 10 Tahun 2016 meski saat ini masih mengalami renovasi ditingkat pusat, dan kita tunggu saja hasilnya.
- Proses pengajuan NPHD kepada Pemda Provinsi Jambi berjalan lancar, antara lain dengan dibahasnya secara bersama oleh Kesbangpol selaku Instansi Teknis sebelum dibahas oleh TAPD.
- Persoalan Pemilu 2019 masih bergulir antara lain Pak Rusdi di Bungo dan Syaihu cs di Sarolangun masih di PUTN.



**d. Taufik (Bawaslu Provinsi Jambi)**

- Catatan krusial selama pelaksanaan Pileg 2019 yang harus diwaspadai pada pelaksanaan Pilkada 2020 antara lain :
  - 1) Adanya kampanye Peserta Pemilu yang tidak menggunakan STTP.
  - 2) Masih ada peserta pemilu yang melaksanakan kampanye dengan melibatkan anak-anak dan mengajak ASN berpolitik praktis.
  - 3) Masih terdapat pemilih yang tidak mengetahui jenis surat suara. Pendistribusian logistic yang terlambat, sehingga proses pemilihan tidak sesuai jadwal dan mengakibatkan PSL.
  - 4) Masih ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pemilih yang pindah memilih mencoblos semua jenis surat suara sehingga mengakibatkan PSU.
  - 5) Surat suara kurang karena tidak sinkron dengan data pemilih.
  - 6) Perubahan regulasi seperti aturan pindah memilih sesuai keputusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019
- Data penanganan tindak pidana pemilu 2019 terdapat 30 pelanggaran pidana pemilu yang terregistrasi yang terdiri dari 14 hasil temuan Bawaslu dan 16 berasal dari laporan.

**e. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi**

- Saat ini Biro Hukum Setda Provinsi Jambi tengah meneliti NPHD yang diajukan oleh TAPD Provinsi Jambi, dan hingga saat ini prosesnya berjalan lancar sesuai rencana, Insya Allah proses penandatanganan NPHD dapat berjalan sesuai rencana paling lambat tanggal 1 Oktober 2019.
- Peraturan Pilkadaes pada Biro Hukum Provinsi Jambi hanya bersifat konsultatif, sedangkan kewenangan tersebut tetap berada pada Kabupaten/Kota masing-masing.

**4. Rekomendasi**

- a. Keberhasilan Pilkada merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.
- b. Penguatan sinergitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan Pilkada bagi keberhasilan penyelenggaraan Pilkada.
- c. Bantuan dan fasilitas Pemerintah dan Pemda sangat diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan Pilkada.
- d. Peningkatan sosialisasi terutama pada sisi keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan Pilkada.

Demikian Notulen Rapat ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

NOTULIS,

PIMPINAN SIDANG/RAPAT



**ZULKARNAIN, S.ST, MM.**

Pembina – IV/a

NIP. 19690816 199203 1 007

**BENI SURIAMAN, S.STP, MM.**

Permbina – IV/a

NIP. 19840713 200312 1 001